



## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Sampang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2019.

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sampang, antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang.

Perekonomian global diproyeksikan akan melanjutkan tren peningkatan pertumbuhan, namun dengan tingkat akselerasi yang lebih moderat. Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan mencapai 3,6 persen, naik tipis dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 3,5 persen. Demikian pula dengan World Bank yang juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat tipis dari 2,7 persen di tahun 2017 menjadi 2,9 persen di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global yang lebih moderat di tahun 2018 antara lain didorong oleh pertumbuhan volume perdagangan dunia yang diperkirakan akan mengalami moderasi.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 utamanya masih akan ditopang oleh kelompok negara berkembang yang mendapat dorongan dari perbaikan harga komoditas serta permintaan domestik yang kuat. Sementara itu, pertumbuhan



ekonomi Negara maju diperkirakan akan relatif stagnan karena dibayangi oleh beberapa tantangan seperti perkembangan dari proses Brexit dan dampaknya bagi Inggris dan Eropa, serta perekonomian Jepang yang masih rentan di tengah tingkat konsumsi yang masih rendah.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan berada di 3,9% tahun 2018 dan 2019 didorong pemulihan pertumbuhan di AS dan China. Angka tersebut lebih tinggi 0,2% dari perkiraan yang dibuat lembaga itu bulan Oktober lalu. Namun, dalam laporan World Economic Outlook-nya, IMF juga menyatakan pertumbuhan ekonomi AS akan mulai melambat setelah tahun 2022 sebab efek insentif dari reformasi pajak mulai menghilang. Sementara itu, ekonomi China diharapkan tumbuh 6,6% tahun ini dan melambat menjadi 6,4% tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN 5, yang mencakup Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, diperkirakan mencapai 5,3% di tahun 2019.

Dalam penguatan proyeksi ekonomi tahun 2019, terdapat beberapa hambatan, antara lain:

1. Ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi kembali terjadi pada 2019 dan 2020 mendatang. Mengutip laporan Prospek Ekonomi Global, pertumbuhan ekonomi dunia kembali melambat menjadi hanya 3 persen pada 2019 dan 2,9 persen pada 2020. Pertumbuhan ekonomi AS, misalnya, diperkirakan melorot ke 2,1 persen pada tahun depan dan satu tahun setelahnya. Pasalnya, ekonomi AS dinilai sudah mendekati kapasitas penuh dan normalisasi kebijakan moneter kemungkinan meningkat. Hal serupa juga terjadi pada perekonomian China. Namun, perlambatan ekonomi China mulai terjadi pada tahun ini dan terus menciut 6,3 persen pada 2019 mendatang.

2. Pertumbuhan investasi dan perdagangan yang melambat.

Pertumbuhan investasi yang melambat terjadi pada negara berkembang (EMDEs). Penurunan investasi dan akumulasi modal pada negara tersebut dapat menurunkan pertumbuhan output secara substansial. Penurunan output secara agregat dapat berdampak pada perlambatan aktivitas perdagangan (ekspor). Melalui kondisi tersebut, maka kebijakan yang perlu untuk diimplementasikan adalah perluasan atau peningkatan aktivitas ekonomi,



mengakomodasi cepatnya urbanisasi, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

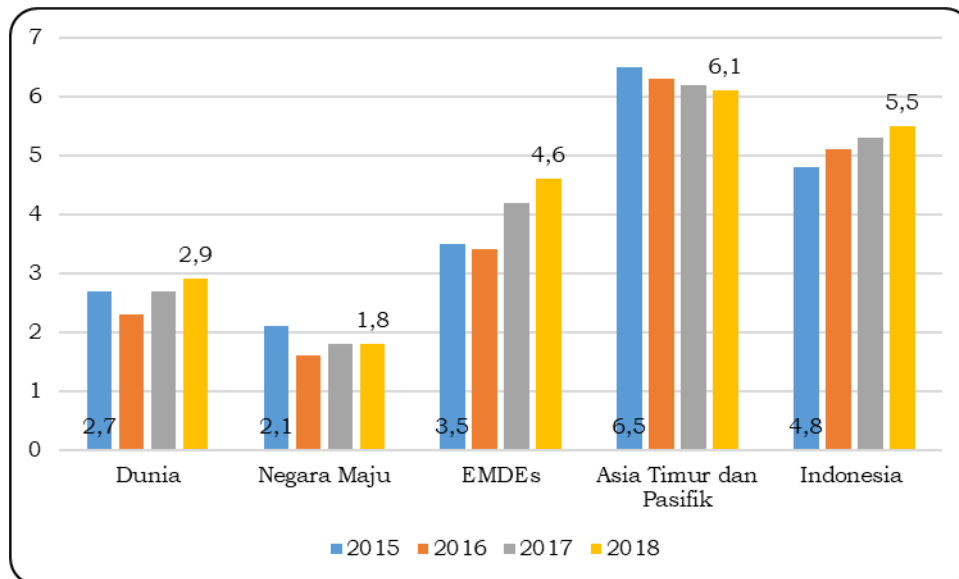
3. Ketidakpastian kebijakan di negara maju dan pada beberapa *emerging market* dan negara berkembang, termasuk US dan Eropa.

Ketidakpastian kebijakan di US mencakup ketidakpastian mengenai kebijakan fiskal, perdagangan maupun kebijakan luar negeri. Lebih lanjut, World Bank juga menambahkan bahwa goncangan pada ketidakpastian kebijakan ekonomi di US dapat mengurangi nilai GDP dan pertumbuhan investasi selama 2 tahun berturut-turut. Peningkatan volatilitas pada pasar saham akan mengurangi persentase GDP dan pertumbuhan investasi *emerging market* dan negara berkembang (EMDEs) pada satu tahun berikutnya.

Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian, maka negara maju akan meningkatkan proteksionisme, ketika negara EMDEs menggunakan hambatan berupa tarif impor dan pajak ekspor. Bentuk proteksi perdagangan yang dilakukan misalnya anti dumping, dan hambatan/ perlindungan lainnya. Dengan demikian, salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah menjaga kepercayaan negara patner perdagangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka proyeksi ekonomi dunia, negara maju, *emerging market* dan negara berkembang adalah sebagai berikut.

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan GDP Riil Dunia, Negara Maju, *Emerging Market* dan Negara Berkembang (EMDEs), Asia Timur dan Pasifik, serta Indonesia**



Sumber: World Bank, 2017

Ket: 2015 merupakan nilai riil; 2016 merupakan estimasi; 2017 dan 2018 merupakan proyeksi

Perkembangan GDP *emerging market* dan negara berkembang diproyeksikan meningkat pada tahun 2018, seiring dengan peningkatan pertumbuhan GDP dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam *emerging market* dan negara berkembang, khususnya dalam kelompok Asia Timur dan Pasifik. Berbeda dengan kondisi dan perkembangan *emerging market* dan negara berkembang secara keseluruhan, negara yang termasuk dalam kelompok Asia Timur dan Pasifik justru diproyeksikan mengalami penurunan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya GDP China, seiring dengan penurunan investasi di sektor privat.

Posisi Indonesia berkebalikan dengan kelompok Asia Timur dan Pasifik, dimana pertumbuhannya justru diproyeksikan meningkat. Peningkatan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh World Bank dipicu oleh peningkatan investasi swasta yang diperkirakan akan terus meningkat. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2017 dan 2018 cukup stabil, sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya (yoy). Rincian perkembangan GDP dunia, negara maju, negara berkembang dan beberapa negara lainnya serta volume perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 3. 1**  
**Persentase Perkembangan GDP (yoy) dan Volume Perdagangan**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Riil GDP		Estimasi	Proyeksi		
<b>World</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.3</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>
<b>Advanced economies</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>
United States	2.4	2.6	1.6	2.2	2.1	1.9
Euro Area	1.2	2.0	1.6	1.5	1.4	1.4
Japan	0.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.4
<b>Emerging and developing economies (EMDEs)</b>	<b>4.3</b>	<b>3.5</b>	<b>3.4</b>	<b>4.2</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>
Commodity exporting EMDEs	2.1	0.4	0.3	2.3	3.0	3.1
Other EMDEs	6.0	6.0	5.6	5.6	5.7	5.8
Other EMDEs excluding China	4.5	5.0	4.3	4.6	5.0	5.1
East Asia and Pacific	6.7	6.5	6.3	6.2	6.1	6.1
China	7.3	6.9	6.7	6.5	6.3	6.3
<b>Indonesia</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>5.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>
Thailand	0.8	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4
Europe and Central Asia	2.3	0.5	1.2	2.4	2.8	2.9
Russia	0.7	-3.7	-0.6	1.5	1.7	1.8
Turkey	5.2	6.1	2.5	3.0	3.5	3.7
Poland	3.3	3.9	2.5	3.1	3.3	3.4
Latin America and the Caribbean	0.9	-0.6	-1.4	1.2	2.3	2.6
Brazil	0.5	-3.8	-3.4	0.5	1.8	2.2
Mexico	2.3	2.6	2.0	1.8	2.5	2.8
Argentina	-2.6	2.5	-2.3	2.7	3.2	3.2
Middle East and North Africa	3.3	3.2	2.7	3.1	3.3	3.4
Saudi Arabia	3.6	3.5	1.0	1.6	2.5	2.6
Iran, Islamic Rep.	4.3	1.7	4.6	5.2	4.8	4.5
Egypt, Arab Rep.	2.9	4.4	4.3	4.0	4.7	5.4
South Asia	6.7	6.8	6.8	7.1	7.3	7.4
India	7.2	7.6	7.0	7.6	7.8	7.8
Pakistan	4.0	4.0	4.7	5.2	5.5	5.8
Bangladesh	6.1	6.6	7.1	6.8	6.5	6.7
Sub-Saharan Africa	4.7	3.1	1.5	2.9	3.6	3.7
South Africa	1.6	1.3	0.4	1.1	1.8	1.8
Nigeria	6.3	2.7	-1.7	1.0	2.5	2.5
Angola	5.4	3.0	0.4	1.2	0.9	0.9
<b>Memorandum items:Real GDP</b>						
High-income countries	1.9	2.2	1.6	1.8	1.8	1.7
Developing countries	4.4	3.6	3.5	4.4	4.8	4.9
Low-income countries	6.2	4.8	4.7	5.6	6.0	6.1
BRICS	5.1	3.8	4.3	5.1	5.4	5.5
World (2010 PPP weights)	3.5	3.3	3.0	3.5	3.7	3.7
<b>World trade volume</b>	<b>3.7</b>	<b>2.8</b>	<b>2.5</b>	<b>3.6</b>	<b>4.0</b>	<b>3.9</b>
<b>Commodity prices</b>						
Oil price	-7.5	-47.3	-15.1	28.2	8.4	4.6
Non-energy commodity price index	-4.6	-15.0	-2.6	1.4	2.2	2.1

Sumber: World Economic Outlook, 2016



Peningkatan investasi mengindikasikan adanya ekspansi aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan investasi (baik pemerintah maupun swasta), maka output perekonomian diharapkan dapat meningkat pula. Peningkatan output dalam lingkup nasional (agregat), tidak hanya dimanfaatkan dalam negeri, tetapi juga dapat diekspor. Dengan demikian, kemungkinan nilai pertumbuhan ekonomi nasional juga turut meningkat.

Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2019-2021 adalah sebagai berikut :

- a) **Pertumbuhan ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diupayakan untuk terus meningkat sejalan dengan membaiknya perkiraan perekonomian global. Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan perbaikan ekonomi global sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan diarahkan pada peningkatan peran investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan dan mempertahankan pertumbuhan dari konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga akan didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk yang berusia produktif dan masyarakat berpenghasilan menengah. Sedangkan, dari sisi investasi dan belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur disertai dengan iklim investasi yang kondusif akan menjadi motor penggerak utama. Dari sisi perdagangan, relatif stabilnya harga minyak dan komoditas, serta stabilitas perekonomian yang akan dicapai oleh negara-negara maju seperti AS akan berdampak pada ekspor dan impor. Dari sisi sektoral, pembangunan infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, investor asing, maupun domestik, akan berdampak positif terhadap seluruh sektor terutama sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Sedangkan transisi demografi, yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, akan mendorong tumbuhnya permintaan dari masyarakat berpenghasilan menengah yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya sektor transportasi dan komunikasi, termasuk jasa pendidikan dan keuangan serta



asuransi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai rentang 5,5-6,9 persen pada tahun 2019-2021.

- b) **Inflasi.** Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai akan memperkuat sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan mendorong lancarnya arus distribusi barang yang mendukung program stabilisasi harga. Pada saat yang sama, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui program-program kesejahteraan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat. Peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga inflasi masing-masing daerah juga diperkuat untuk mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Dalam rangka pencapaian laju inflasi yang terkendali, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menciptakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan riil untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, Pemerintah memperkirakan bahwa inflasi pada tahun 2019-2021 dapat dijaga pada kisaran 2,0-4,5 persen dengan tren menurun.
- c) **SPN 3 bulan.** Pada tahun 2019-2021, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun. Dari sisi faktor eksternal, perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan diperkirakan akan lebih moderat. Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Berbagai faktor domestik yang semakin kondusif diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tingkat yang relatif rendah. Faktor perekonomian eksternal dan domestik yang didukung kondisi fiskal yang sehat akan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada



tahun 2019 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,6-5,4 persen dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020-2021 pada kisaran 4,5-5,3 persen.

- d) **Nilai Tukar Rupiah.** Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik Pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yang menjadi dasar perkiraan pergerakan nilai tukar di tahun 2019 hingga 2021. Dari sisi permintaan, arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi ke depan akan mendorong peningkatan kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi, seperti mesin-mesin serta bahan baku yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan-kebijakan penguatan dan pendalaman sektor keuangan akan mampu mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap sumber pembiayaan dan utang luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, strategi penguatan daya saing ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri. Di samping itu, perbaikan kinerja perekonomian dan iklim investasi diperkirakan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk jangka panjang seperti penanaman modal asing maupun dalam bentuk jangka pendek seperti portofolio valuta asing dari luar negeri. Namun demikian, terdapat faktor risiko lain yang berasal dari perbaikan kondisi ekonomi global ke depan yang menjadi tantangan bagi perkembangan arus modal masuk tersebut. Pergerakan nilai tukar juga akan dipengaruhi oleh faktor lain yang mampu mengurangi risiko volatilitas nilai tukar ke depan. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema





hedging untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2019 hingga 2021 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.500- 14.000.

- e) **Harga Minyak Mentah Indonesia.** Pergerakan harga minyak mentah dunia jangka menengah diperkirakan mengalami tren meningkat seiring dengan perbaikan permintaan dunia yang didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian global. Hal ini berdampak pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia yang juga diperkirakan mengalami peningkatan. Di sisi lain, terdapat juga factor-faktor yang menghambat kenaikan harga minyak mentah dunia, seperti adanya potensi kenaikan cadangan minyak dunia seiring dengan tren peningkatan produksi minyak mentah, terutama di berbagai negara Non-OPEC. Selain itu, penggunaan energi alternatif, seperti shale gas dan biofuel juga dapat mendorong penurunan harga minyak mentah. Namun demikian, faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti perkembangan geo-politik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, ICP diperkirakan berada pada kisaran harga 45-65 dolar AS per barel pada periode tahun 2019-2021.
- f) **Lifting Minyak dan Gas Bumi.** Dalam jangka menengah, lifting minyak cenderung terus menurun terutama disebabkan oleh usia sumur yang semakin menua dan upaya eksplorasi terhambat karena kurangnya akses infrastruktur ke sebagian besar potensi lokasi cadangan minyak. Lifting minyak bumi di tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 651-802 ribu bph. Guna mengantisipasi penurunan yang lebih tajam dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah berupaya menjalankan strategi dan kebijakan baik secara teknis maupun nonteknis serta upaya khusus untuk meningkatkan daya tarik (attractiveness) investasi. Dalam kaitannya dengan peningkatan daya tarik investasi, Pemerintah akan berupaya menyediakan infrastruktur dasar serta memberikan dukungan insentif fiskal seperti fasilitas pajak dan bea masuk. Integrasi dalam mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang bisnis yang berkembang diharapkan dapat



terrealisasi di masa mendatang. Sementara itu, lifting gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil pada kisaran 1,20-1,30 juta bsmph. Walaupun cadangan gas bumi masih cukup besar, Pemerintah menyadari bahwa pencapaian lifting gas bumi pada jangka menengah tersebut tidaklah mudah. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya agar lifting gas bumi tersebut dapat tercapai melalui berbagai upaya antara lain optimalisasi produksi lapangan yang sudah ada, pengembangan lapangan baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi, sehingga dapat ditemukan sumber-sumber gas baru sejalan dengan implementasi kebijakan yang dapat mendorong investasi di sektor gas.

Sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2019 – 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 2**  
**Sasaran dan Asumsi Makro Nasional 2019-2021**

Indikator	2019	2020	2021
	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,5-6,5	5,7-6,7	5,9-6,9
Inflasi (% ,yoy)	2,5-4,5	2,0-4,0	2,0-4,0
Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.500-13.900	13.700-14.000	13.700-14.000
Suku Bunga SPN 3 Bulanan (% ,rata-rata)	4,6-5,4	4,5-5,3	4,5-5,3
Harga Minyak/ ICP (USD per barel)	45-60	50-65	50-65
Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari)	722-850	695-840	651-802
Lifting Gas (BOE/hari)	1210-1300	1191-1300	1226-1300

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

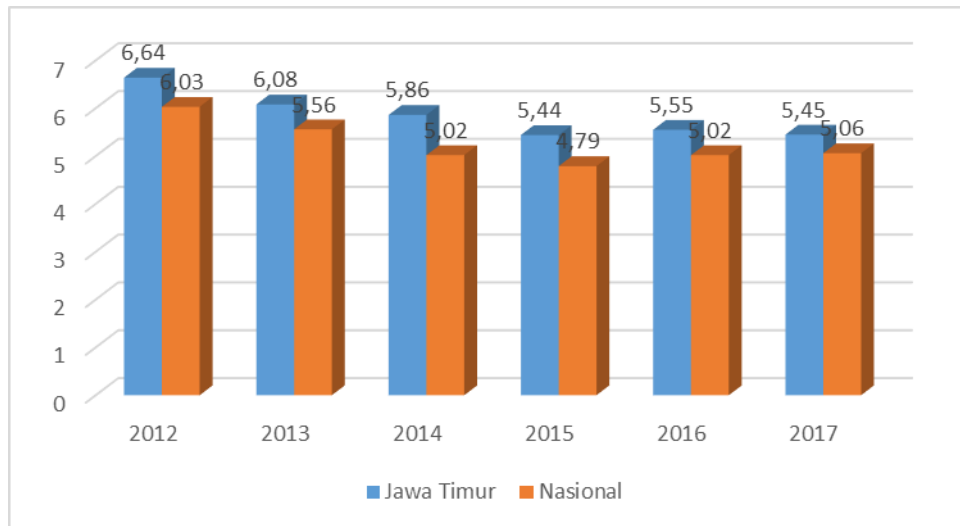
Berdasarkan tabel tersebut diatas, sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,5 – 6,5 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 2,5-4,5;
3. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.500-13.900 (USD/IDR);
4. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulanan diperkirakan sebesar 4,6-5,4 % ;
5. Harga minyak diperkirakan pada kisaran 45-60 USD per barel;
6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 722-850 ribu barel per hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 1210-1300 ribu barel per hari.

Pada level provinsi, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 menunjukkan penurunan. Realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar

5,45 persen. Capaian tersebut bergerak turun 0,10 poin dari tahun 2016. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat dalam gambar berikut.

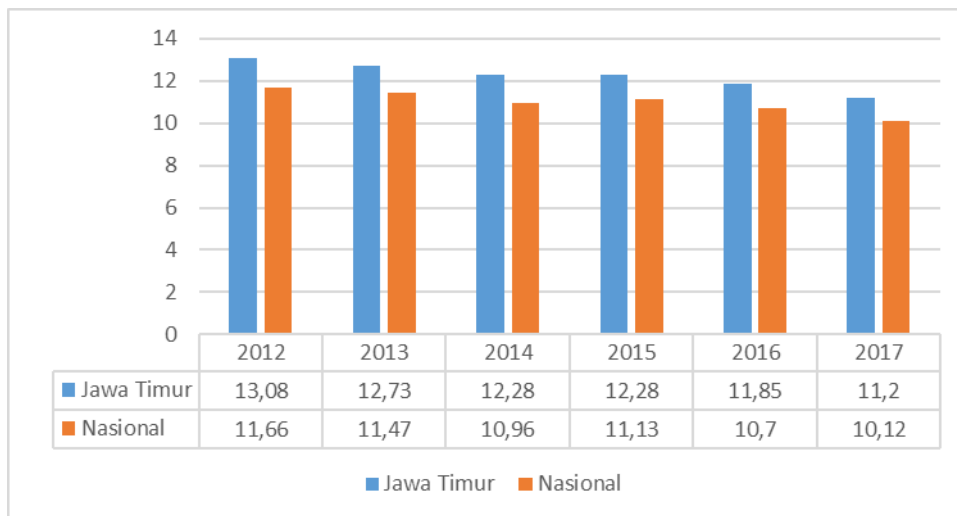
**Gambar 3. 2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017**



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Dari sisi perkembangan persentase penduduk miskin, Provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan yang sama dengan Nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2017. Tingkat kemiskinan Jawa Timur tahun 2017 sebesar 11,2 persen, dan pada level nasional sebesar 10,12 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

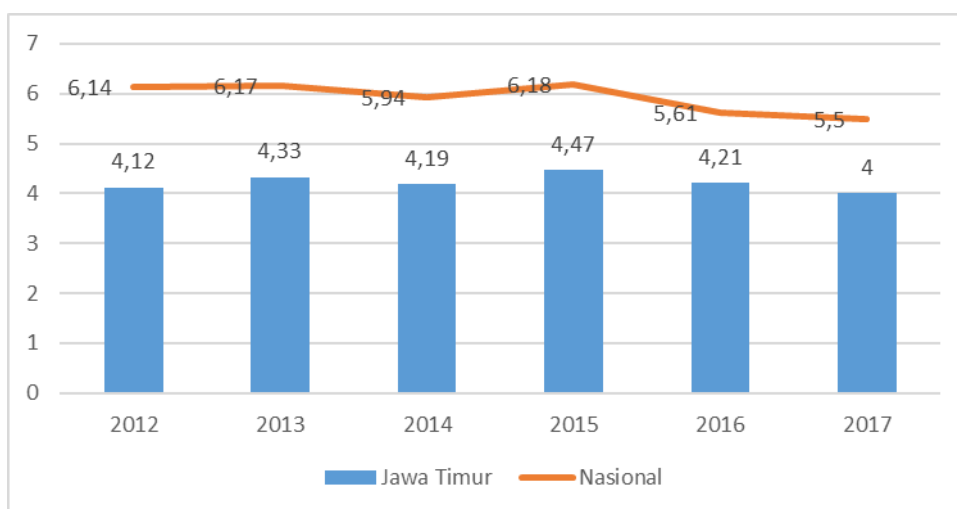
**Gambar 3.3**  
**Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017**



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka juga berkurang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 sebesar 4,00 persen, dimana sebelumnya sebesar 4,21 persen (tahun 2016). Penurunan TPT di Jawa Timur juga bersamaan dengan turunnya TPT di level nasional, dimana pada tahun 2017 persentasenya sebesar 5,55 persen. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Timur dan Nasional adalah sebagai berikut.

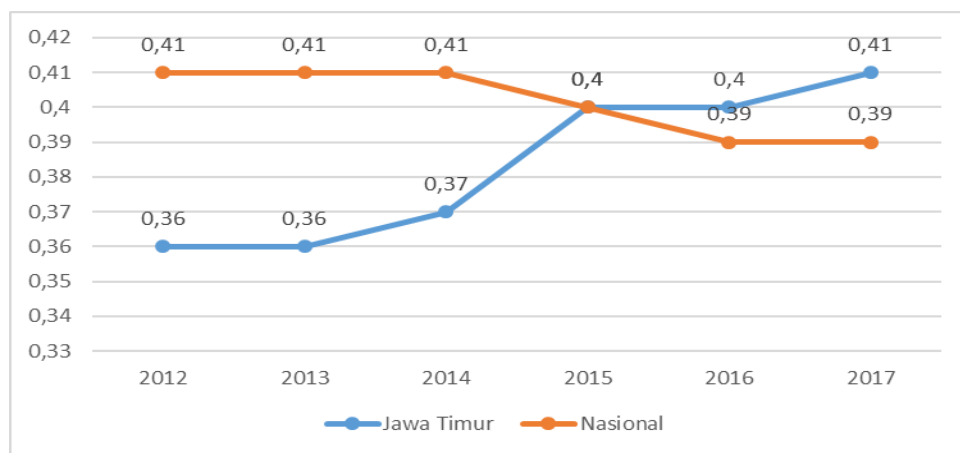
**Gambar 3.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017**



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Indeks gini di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 masih berada pada level sedang. Namun demikian, indeks tersebut tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional ataupun tahun 2016. Pada tahun 2017, indeks gini Jawa Timur sebesar 0,41. Sedangkan pada tingkat nasional, indeks gini cenderung tetap pada level 0,39. Perkembangan indeks gini nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 3.5**  
**Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017**



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Berdasarkan perkembangan indikator makro ekonomi, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 dan menyelaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional, maka target kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dalam IKU adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Indikator dan Target Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019**

No	Indikator	Target Kinerja 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,66 – 6,06
2.	Indeks Gini	0,380 – 0,400
3.	Pemerataan Pendapatan	18,40 – 18,60
4.	Persentase Penduduk Miskin	11,20 – 10,90
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,00 – 70,25
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,51 – 94,01
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,99 – 3,90
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,00 – 68,52
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00 – 84,00
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	69,00 – 71,00
11.	Indeks Kebahagiaan /Kesalehan Sosial	69,01 – 67,25

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2018



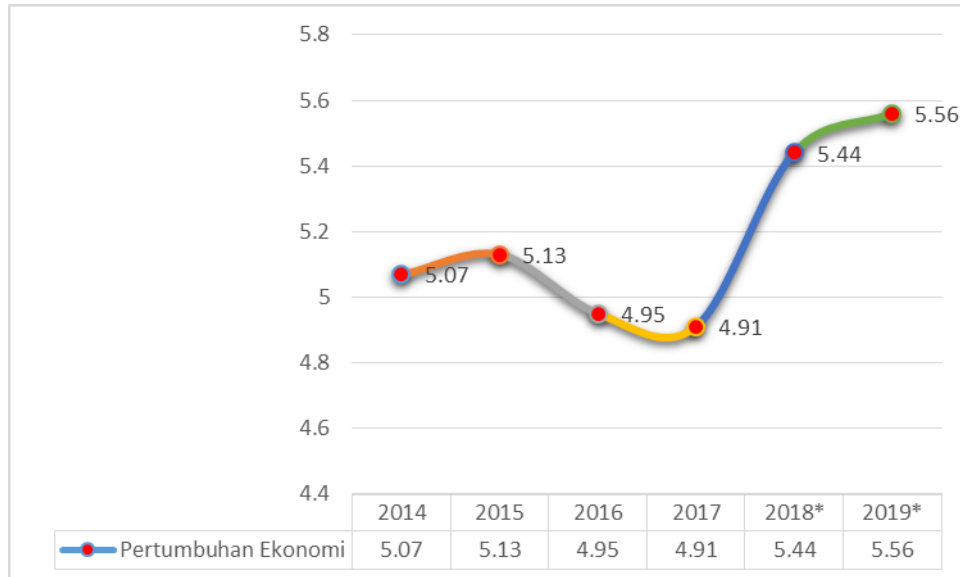
Seiring dengan optimisme proyeksi peningkatan pertumbuhan nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga diperkirakan akan bergerak meningkat pada level 5,66 – 6,06 persen pada tahun 2019. Seiring dengan proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan IPM juga diperkirakan turut meningkat. Target kinerja kedua IKU tersebut masing-masing diproyeksikan 18,40 – 18,60 (Pemerataan Pendapatan) dan 70,00 – 70,25 (IPM). Disisi lain, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan turun, masing-masing pada level 11,20 – 10,90 persen dan 3,99 – 3,90. Sedangkan untuk target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (67,00 – 68,52), Indeks Kepuasan Masyarakat (83,00 – 84,00), Indeks Reformasi Birokrasi (69,00 – 71,00), dan Indeks Kebahagiaan / Kesalehan Sosial (69,01 – 67,25) yang mana keempatnya merupakan IKU tambahan, yang menyesuaikan dengan regulasi baru.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2019**

Proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2019 diperhitungkan dengan memperhatikan perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator makro yang menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sampang antara lain: pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, perkembangan investasi, dan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang pada tahun 2017 menunjukkan penurunan, dari 4,95 pada tahun 2016 menjadi 4,91 pada tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan adanya berkurangnya produktivitas pertanian yang merupakan kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Sampang. Namun demikian, pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi di proyeksikan kembali meningkat menjadi 5,44 persen tahun 2018 dan 5,56 persen tahun 2019. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut.

**Gambar 3. 6**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2019**



Sumber: BPS Kab. Sampang, 2018, \*) merupakan target

Indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah di antaranya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), karena melalui penghitungan ini besaran nilai tambah sudah tidak lagi dipengaruhi oleh faktor harga.

Dari 17 sektor penunjang PDRB Kabupaten Sampang, pada tahun 2017 semua sector mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Dari sisi nominal, sektor pertanian memiliki nilai tertinggi dalam pembentukan PDRB, baik pada tahun 2016 ataupun tahun 2017. Pada tahun 2016, pendapatan daerah dari sektor pertanian sebesar Rp5.563.681,55 juta, Selanjutnya tahun 2017, nilainya menunjukkan peningkatan menjadi sebesar Rp 6.129.154,00 juta. Besarnya nilai pendapatan tersebut disebabkan pertanian merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Sampang. Selain pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi juga memiliki nilai yang cukup tinggi dalam pembentukan PDRB. Perkembangan nilai masing-masing sektor dan sub sektor dalam PDRB ADHK dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 3. 4  
PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017*
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</b>	5.563.681,55	6.129.154,00
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.874.341,00	4.359.097,20
	a. Tanaman Pangan	2.196.256,00	2.130.447,90
	b. Tanaman Hortikultura	435.819,00	128.328,70
	c. Tanaman Perkebunan	788.576,00	9.379,06
	d. Peternakan	1.382.679,00	250.292,08
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	71.011,00	63.444,38
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	30.339,40	33.725,62
	3 Perikanan	1.422.219,00	1.356.430,30
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	858.094,80	953.247
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	555.626,39	604.887,00
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	5.219,53	5.637,46
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	11.878,04	13.046,60
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	1.462.999,57	1.590.000,00
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	2.758.317,23	3.075.930,00
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	155.845,87	181.136,00
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	65.714,80	74.498,70
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	707.769,82	777.683,00
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	216.847,26	240.953,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	212.518,26	234.812,00
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	48.968,37	53.351,40
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	767.679,39	822.877,00
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	499.712,54	822.877,00
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	87.760,60	98.133,90
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	154.141,08	174.031,00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>14.132.775,10</b>	<b>15.852.255,06</b>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Keterangan : \*) Angka Proyeksi





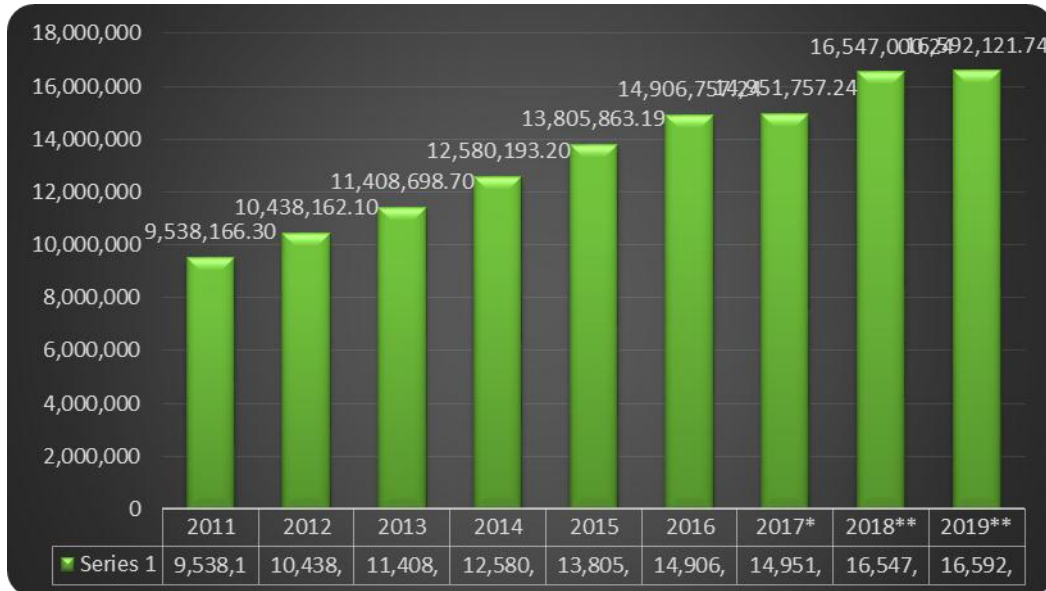
Tabel 3. 5  
PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.834.167,65	4.031.197,00
B	Pertambangan dan Penggalian	612.931,00	633.563,00
C	Industri Pengolahan	448.159,69	472.497,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.765,33	4.864,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.533,11	9.657,22
F	Konstruksi	1.062.078,50	1.072.353,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.099.345,39	2.214.786,00
H	Transportasi dan Pergudangan	121.384,13	129.364,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.258,24	54.366,90
J	Informasi dan Komunikasi	652.078,76	690.846,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	161.820,18	168.950,00
L	Real Estate	168.944,71	176.395,00
M,N	Jasa Perusahaan	35.928,49	37.794,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	565.972,92	608.375,00
P	Jasa Pendidikan	365.666,10	390.534,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.328,48	66.927,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	118.891,62	124.150,00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>10.377.254,29</b>	<b>10.886.620,94</b>

Sumber : BPS Kabupaten Sampang  
Keterangan : \*) Angka Sangat Sementara

Seiring dengan peningkatan PDRB ADHK, nilai pendapatan perKapita juga menunjukkan kondisi yang serupa. Realisasi pendapatan perKapita Kabupaten Sampang Tahun 2016 sebesar Rp 14,91 juta. Kemudian, pada tahun 2017 naik menjadi 14,95 juta dan 2018 pendapatan perkapita diproyeksikan Rp 16,54 juta dan Rp. 16,59 juta pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata nilai pendapatan masyarakat secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Perkembangan pendapatan perKapita Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 3. 7**  
**Pendapatan Per Kapita Kab. Sampang Tahun 2011 – 2019**



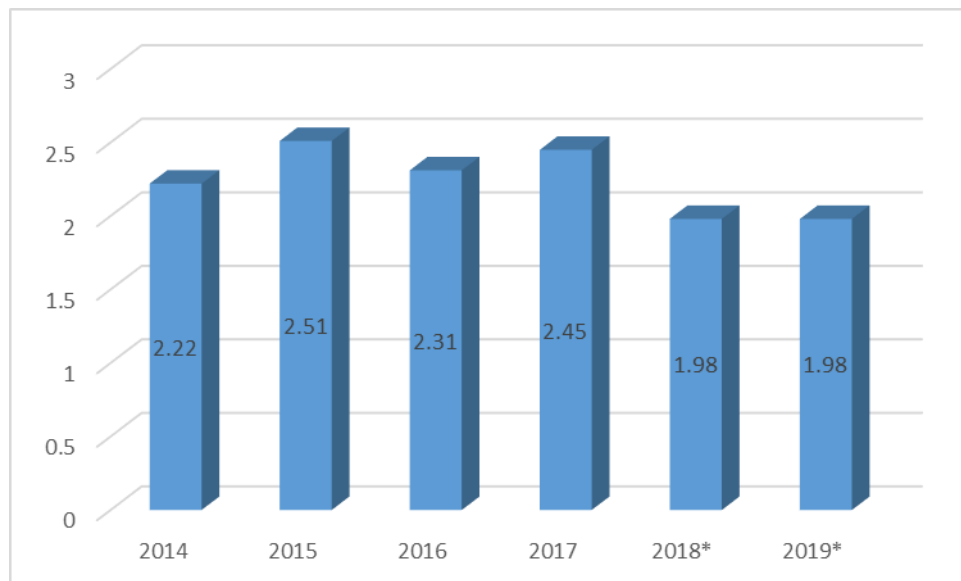
Sumber: BPS Kab. Sampang

\*) Angka sangat sementara

\*\*\*) Angka proyeksi

Dengan prioritas pembangunan yang salah satunya menekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, maka persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sampang diproyeksikan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 persentase TPT sebesar 2,31 persen, dan pada tahun 2017 sebesar 2,45 persen. Kemudian, dengan adanya berbagai program untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan dan pembekalan maka persentase TPT diharapkan semakin menurun, sampai dengan persentase 1,98 persen pada tahun 2018 dan 1,98 persen pada tahun 2019. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam gambar berikut.

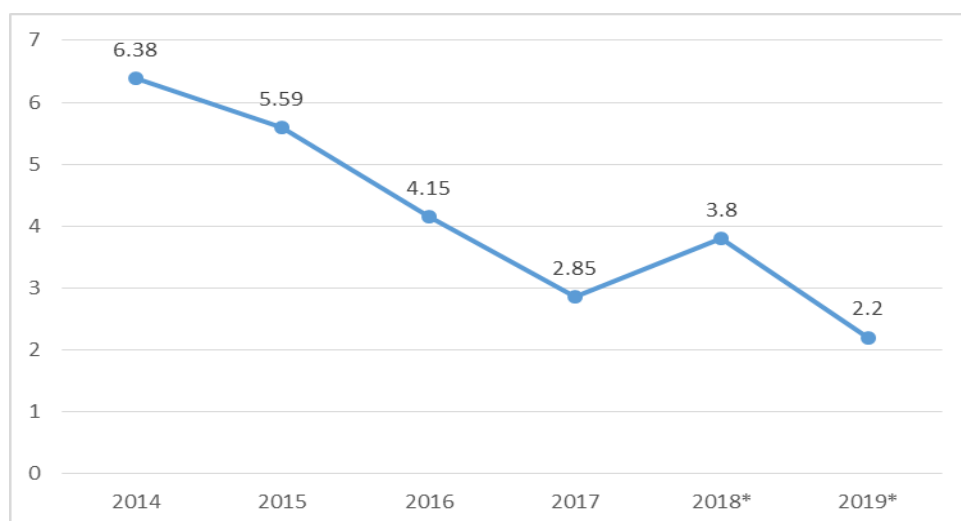
**Gambar 3. 8**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 - 2019**



Sumber: BPS Kab. Sampang, 2017 \*) merupakan target (proyeksi)

Senada dengan proyeksi TPT, tingkat inflasi di Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan. Realisasi tingkat inflasi di Kabupaten Sampang pada tahun 2016 mencapai 4,15 persen. Kemudian pada tahun 2017 dapat ditekan menjadi 2,85 persen dan 2018 dan 2019 tingkat inflasi diproyeksikan dapat dikendalikan sampai 3,8 persen dan 2,20 persen. Ringkasan perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 3. 9**  
**Perkembangan Inflasi Kabupaten Sampang Tahun 2014 - 2019**



Sumber: BPS Kab. Sampang, 2017 \*) merupakan target (proyeksi)



Secara umum dari tahun 2013 - 2017, perkembangan nilai investasi Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan. Peningkatan nilai investasi berskala nasional, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan peningkatan sebesar 124,76 persen. Pada tahun 2015, nilai investasi secara keseluruhan sebesar Rp169.118 juta. Kemudian meningkat menjadi Rp 380.107 juta. Disisi lain, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Sampang justru menunjukkan penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2015 nilainya sebesar Rp 788.386 juta, kemudian turun menjadi Rp 501.951 pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 nilai investasi mengalami penurunan. Penurunan investasi tersebut disebabkan masa transisi dari proses perijinan yang semula seluruh jenis perijinan ditangani oleh DPM PTSP pada tahun 2017 sesuai dengan PERBUP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perijinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) ternyata belum berjalan secara optimal. Perkembangan indikator investasi Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 6**  
**Perkembangan Investasi Kabupaten Sampang Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Unit Usaha	647	739	751	620	507
2	Jumlah ijin permodalan	715	613	762	625	504
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam juta rupiah	120.920	150.825	169.118	380.170	338.557
4	Realisasi Investasi PMDN (juta rupiah)	764.553	769.492	788.386	501.951	338.557

Sumber: LKPJ Kabupaten Sampang 2017

Senada dengan perkembangan realisasi investasi PMDN, pada tahun 2017 jumlah ijin usaha dan jumlah ijin permodalan juga mengalami penurunan. Jumlah unit usaha, 507 unit pada tahun 2017, dimana sebelumnya (tahun 2016) sejumlah 620 unit. Kemudian, jumlah ijin permodalan yang diterbitkan sejumlah 504, yang turun sejumlah 121 dari tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan masa transisi dari proses perijinan, yang semula ditangani oleh KP3M pada tahun 2016 sesuai dengan PERBUP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati

Kepada Camat di Bidang Perijinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) belum berjalan secara optimal. Berdasarkan perkembangan indikator perekonomian Kabupaten Sampang secara keseluruhan, maka prospek dan prediksi perekonomian pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 7**  
**Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Sampang Tahun 2019**

Indikator	Realisasi				Proyeksi	
	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,13	4,95	4,91	5,44	5,56
Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	12,58	13,80	14,91	14,95	16,54	16,59
TPT (%)	2,22	2,51	2,31	2,45	1,98	1,98
Inflasi	6,38	5,59	4,15	2,85	3,80	2,20
Angka Kemiskinan (%)	25,80	25,69	24,11	23,56	21,97	21,56

Sumber: BSP dan Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018

Catatan: Tahun 2018 dan 2019 merupakan angka sangat sementara, \*) proyeksi

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan Tahun 2019**

Penyusunan perencanaan pembangunan dan prospek perekonomian Kabupaten Sampang perlu memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan. Tidak hanya di tingkat daerah saja, tetapi juga pada tingkat nasional, dan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, penyusunan arah kebijakan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan misi RPJPD Kabupaten Sampang 2005 – 2025 terbagi menjadi 7 (tujuh) bidang, dimana pada masing-masing level pemerintahan masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan terbagi dalam beberapa bidang, antara lain: (i) Geomorfologi dan Lingkungan Hidup; (ii) Demografi; (iii) Ekonomi; (iv) sosial; (v) Prasarana dan Sarana; (vi) Pemerintahan; (vii) Politik.

#### **a. Bidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.**

Permasalahan :

- 1) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan terjangkau,
- 2) Masih banyaknya adanya permukiman kumuh dan belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum permukiman
- 3) Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat belum optimal
- 4) Sarana sanitasi masyarakat masih rendah



b. Bidang Demografi.

Permasalahan :

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat ber KB
- 2) Banyaknya tindak kekerasan pada perempuan dan anak
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat baik identitas kependudukan dan kecukupan pangan masyarakat perlu ditingkatkan
- 4) Gizi Buruk masih tinggi
- 5) Cakupan kesehatan rujukan rendah
- 6) Lingkungan sehat belum dinikmati masyarakat

c. Bidang Ekonomi.

Permasalahan :

- 1) Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah (value added) sehingga kontribusi terhadap PDRB belum optimal
- 2) Rendahnya kualitas SDM yang tercemin dari masih rendahnya produktivitas dan pemanfaatan peluang usaha dan pasar
- 3) Masih terbatasnya petani terhadap sumber daya produksi
- 4) Pendapatan masyarakat rendah
- 5) Masih rendahnya iklim investasi
- 6) Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM
- 7) Masih rendahnya sarana dan prasarana usaha bagu usaha mikro
- 8) Belum optimalnya kinerja BUMD
- 9) Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata
- 10) Pengelolaan pasar tradisional belum optimal
- 11) Kualitas SDM tenaga kerja masih rendah
- 12) Penyediaan lapangan pekerjaan masih minim
- 13) Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal

d. Bidang sosial.

Permasalahan :

- 1) Rendahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
- 2) Kurangnya kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
- 3) Kurangnya kompetensi dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan;
- 4) Penanganan PMKS belum Optimal
- 5) Sarana sosial belum memadai
- 6) Peningkatan ketahanan paangan masyarakat



e. Bidang Prasarana dan Sarana.

Permasalahan :

- 1) Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mitigasi bencana
- 2) Masih luasnya genangan banjir
- 3) Belum terbentuknya desa tangguh bencana
- 4) Belum optimalnya layanan Prasarana Sumber Daya Air
- 5) Akses wilayah khususnya daerah pinggiran/terisolir
- 6) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur daerah
- 7) Pemerataan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dasar terutama bagi wilayah potensial menjadi pusat pertumbuhan baru dan daerah pinggiran/terpencil, sehingga potensi wilayah belum dapat dimanfaatkan secara optimal

f. Bidang Pemerintahan.

Permasalahan :

- 1) Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan public
- 2) Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah keterbukaan informasi publik belum optimal
- 3) Akses Teknologi Informasi bagi masyarakat masih rendah
- 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi dan administrasi desa, sehingga desa mandiri masih rendah
- 5) Kualitas perencanaan, penganggaran serta pengelolaan keuangan dan aset perlu ditingkatkan

g. Bidang Politik

Permasalahan :

- 1) Ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan masih rendah
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum
- 3) Kejahatan Narkoba makin meningkat

Secara umum masih banyak tantangan perkembangan perekonomian Kabupaten Sampang yang juga dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan nasional. Kondisi perekonomian Kabupaten Sampang yang tumbuh melambat dipengaruhi oleh ketergantungan pendapatan masyarakat terhadap sektor pertanian, sementara itu perkembangan sektor pertanian tidak didukung oleh adanya industri



pengolahannya sehingga tidak ada nilai lebih bagi masyarakat petani terhadap pengolahan dan pemanfaatan hasil pertaniannya.

Konsumsi rumah tangga yang cukup besar karena jumlah penduduk usia produktif dan masyarakat berpenghasilan rendah yang cukup tinggi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, pengeluaran untuk peningkatan peran investasi masih belum berkembang di masyarakat. Investasi juga belum berkembang sehingga penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sangat terbatas. Selain pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi juga memiliki nilai yang cukup tinggi dalam pembentukan PDRB, namun demikian keterbatasan akses masyarakat sehingga sektor perdagangan belum tumbuh secara maksimal.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi penghambat pertumbuhan daya saing perekonomian, keterbatasan tingkat pendidikan masyarakat menjadikan kualitas sumber daya manusia tidak dapat menjadi pengungkit pertumbuhan. Pembangunan sarana infrastuktur juga yang merupakan prioritas utama, termasuk pembangunan sentra-sentra industri dan perdagangan. Kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang mendukung pada peningkatan sektor ekonomi belum optimal, sehingga menghambat pada distribusi produk yang dihasilkan masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur akan semakin memperkuat kinerja perekonomian daerah serta mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, daya beli masyarakat akan membaik.

Pada dasarnya tujuan pembangunan bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkeadilan dan merata serta terciptanya kesempatan berusaha serta tersedianya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang diprioritaskan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang didukung oleh penyediaan infrastruktur publik untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan strategi: (1) Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas; (ii) Peningkatan produktivitas dan *value added* sektor pertanian dan UMKM dalam mendukung daya saing ekonomi daerah; (iii) Peningkatan penyediaan dan perawatan infrastruktur publik melalui pengupayaan *public-private patnership*; (iv)



Optimalisasi sektor unggulan daerah melalui peningkatan investasi; dan (v) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut maka prospek perekonomian Kabupaten Sampang diproyeksikan semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Prospek dan prediksi perekonomian Kabupaten Sampang tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 8**  
**Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Sampang Tahun 2018 - 2019**

Indikator	Proyeksi	
	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	5,56
PDRB ADHK (juta Rp)	11.867.160	12.177.500
PDRB ADHB (juta Rp)	16.689.000	17.774.280
PDRB per Kapita (juta Rp)	16,54	16,59
TPT (%)	1,98	1,98
Inflasi (%)	3,8	2,2
Angka Kemiskinan (%)	21,97	21,56

*Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018*

Berdasarkan tabel diatas, maka proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Sampang diproyeksikan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,44 persen dan semakin meningkat menjadi 5,56 persen pada tahun 2019. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita juga diproyeksikan semakin meningkat menjadi 16,54 juta rupiah dan 16,59 pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2019 diproyeksikan tidak terjadi perubahan signifikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 1,98 persen. Sedangkan untuk inflasi diproyeksikan dapat lebih terkendali dengan persentase 3,8 persen dan 2,20 persen pada tahun 2018 dan 2019. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan, persentasenya diperkirakan menurun menjadi 21,97 persen pada akhir 2018 21,56 persen pada tahun 2019.



### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sampang diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Sampang dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Sampang.

#### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selanjutnya pendapatan yang sah terdiri dari Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya, dan Dana Desa.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang



mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten. Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi proyeksikan meningkat, sebesar  $\pm 5,44$  persen;
2. Inflasi diproyeksikan dapat terkendali, pada kisaran  $\pm 3,8$  persen;
3. Dana Perimbangan diproyeksikan turun sebesar 25,35 persen dari anggaran tahun 2018 (DAK belum diproyeksikan);
4. Target anggaran tahun 2019 diproyeksikan memiliki SILPA Rp 0.

Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan mengalami penurunan, yang diperkirakan sebesar (18,63) persen dari tahun anggaran tahun 2018. Secara nominal, nilai pendapatan daerah Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.669.914.866.347,00 dan proyeksi tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.358.816.547.449,15. Penurunan proyeksi pendapatan daerah disebabkan penurunan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah, nilainya diproyeksikan mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2018 diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. Peningkatan PAD tahun 2018 sebesar 1,05 persen dari tahun sebelumnya. Jika dinominalkan, nilainya sebesar Rp 138.691.769.938,15. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Secara umum, nilai dana perimbangan Kabupaten Sampang pada tahun 2019 diproyeksikan mengalami penurunan. Penurunan dana perimbangan tahun 2018 sebesar (25,35) persen. Nilai tersebut memiliki selisih yang sangat besar dari tahun anggaran 2018. Penurunan dana perimbangan tahun anggaran 2018 disebabkan karena pada tahun 2019 belum dianggarkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik yang Fisik dan Non Fisik. Untuk komponen Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (12,55) persen dari



tahun anggaran 2018, sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan tetap seperti tahun anggaran 2018. Secara nominal pendapatan Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp.896.745.929.050,00.

Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami penurunan sebesar (2,44) persen. Penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah karena belum dialokasikannya penerimaan dari Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi atau Pemda Lainnya sebelum adanya kepastian dari pemberi bantuan. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemda lainnya diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 11,23 persen. Komponen lain dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Dana Hibah dan Dana Desa yang diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2018. Dana hibah, yang berasal dari dana BOS, baik untuk satuan pendidikan SD maupun SMP. Penerimaan dana BOS berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD, dimana diamanatkan harus dianggarkan atau dicatat melalui APBD, meskipun dananya langsung diterima pada sekolah. Secara keseluruhan pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp.323.378.848.461,00.

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren positif. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kemandirian daerah, terutama dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2018, derajat desentralisasi fiskal sebesar 8,22 persen. Seiring dengan peningkatan potensi kemandirian daerah, maka derajat desentralisasi fiskal juga diproyeksikan semakin meningkat menjadi sebesar 10,21 persen pada tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Sampang Tahun dari 2014 sampai dengan 2017 serta target proyeksi Tahun 2018 dan tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sampang Tahun 2014 s.d Tahun 2019**

KODE	Uraian	JUMLAH						
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	APBD 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>123.039.103.222,87</b>	<b>142.512.555.663,45</b>	<b>135.785.953.318,16</b>	<b>168.071.776.882,40</b>	<b>137.245.157.950,00</b>	<b>138.691.769.938,15</b>	<b>139.650.035.122,81</b>
1.1.1	Pajak daerah	14.548.343.521,85	15.139.402.820,66	16.592.698.918,10	20.513.874.067,63	24.881.500.000,00	24.881.500.000,00	24.881.500.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	68.925.957.552,00	16.904.771.577,00	11.330.664.854,00	10.896.816.037,00	14.761.767.150,00	14.958.743.279,00	15.111.085.550,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.891.497.578,35	11.977.496.617,75	6.208.899.767,82	6.251.369.919,40	6.514.215.800,00	6.873.676.410,15	6.873.676.410,15
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	33.673.304.570,67	98.490.884.648,04	101.653.689.778,24	130.409.716.858,37	91.087.675.000,00	91.977.850.249,00	92.783.773.162,66
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>920.167.207.243,00</b>	<b>1.064.694.791.733,00</b>	<b>1.231.099.448.705,00</b>	<b>1.104.228.648.147,00</b>	<b>1.201.195.857.000,00</b>	<b>896.745.929.050,00</b>	<b>896.745.929.050,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	75.015.909.243,00	71.773.051.733,00	74.204.892.211,00	55.059.310.923,00	81.536.959.000,00	71.302.766.050,00	71.302.766.050,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	753.954.218.000,00	788.345.170.000,00	827.952.746.000,00	818.929.326.000,00	825.443.163.000,00	825.443.163.000,00	825.443.163.000,00
1.2.3	Dana Alokasi khusus	91.197.080.000,00	204.576.570.000,00	328.941.810.494,00	230.240.011.224,00	294.215.735.000,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>321.529.332.546,00</b>	<b>529.559.274.903,00</b>	<b>349.902.702.513,00</b>	<b>291.338.414.296,00</b>	<b>331.473.851.397,00</b>	<b>323.378.848.461,00</b>	<b>323.378.848.461,00</b>
1.3.1	Hibah	1.003.290.991,00	923.986.087,00	1.283.126.355,00	17.013.516.432,00	69.304.200.000,00	69.304.200.000,00	69.304.200.000,00
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi	67.271.395.555,00	73.140.027.816,00	72.648.406.158,00	95.739.000.864,00	66.961.335.397,00	74.478.432.461,00	74.478.432.461,00
1.3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	125.764.629.000,00	169.581.504.000,00	41.602.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi	127.490.017.000,00	227.529.193.000,00	103.239.820.000,00	11.093.300.000,00	15,612,100.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Dana Desa	0,00	58.384.564.000,00	131.129.306.000,00	167,492,597.000,00	179,596,216.000,00	179.596.216.000,00	179.596.216.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.364.735.643.011,87</b>	<b>1.736.766.622.299,45</b>	<b>1.716.788.104.536,16</b>	<b>1,563,638,839,325,40</b>	<b>1,669,914,866,347,00</b>	<b>1,358,816,547,449,15</b>	<b>1,369,667,656,111,68</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang dan hasil proyeksi, 2018



Perkembangan persentase total belanja daerah Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2019, menunjukkan penurunan dari tahun anggaran 2018. Penurunan persentase belanja sebesar (20,57) persen atau nilai belanja daerah pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.437.229.878.900,67. Penurunan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan belum teralokasinya belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan belanja yang bersumber Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemda lainnya. Komposisi belanja daerah Kabupaten Sampang sampai dengan tahun anggaran 2019 masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Pada tahun 2019, komposisi Belanja Tidak Langsung diperkirakan sebesar 57,65 persen dan sisanya 42,35 persen merupakan alokasi untuk Belanja Langsung.

Persentase terbesar dalam Belanja Tidak Langsung terdapat pada belanja pegawai, walaupun kecenderungannya semakin menurun setiap tahun. Rincian proyeksi masing-masing komponen belanja tidak langsung tahun 2019 antara lain: (i) Belanja Pegawai sebesar 62,98 persen; (ii) Belanja Hibah sebesar 2,08 persen; (iii) Belanja Bantuan Sosial sebesar 1,13 persen; (iv) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 0,25 persen; (v) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar 33,14 persen (mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa); (vi) Belanja Tidak Terduga sebesar 0,42 persen.

Pertumbuhan persentase Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung menunjukkan penurunan dari tahun 2018. Pada tahun 2019, pertumbuhan Belanja Pegawai sebesar (19,41) persen dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp 521.838.584.429,67. Penurunan Belanja Pegawai pada disebabkan belum teralokasinya Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari DAK Non Fisik.

Belanja Hibah mengalami pengurangan yang cukup signifikan yaitu sebesar (78,33) persen. Pengurangan Belanja Hibah terutama karena tidak adanya pembiayaan Pilkada serentak baik hibah kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu maupun untuk kegiatan pengamanan Pilkada. Tahun anggaran 2019 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp17,244.500.000,00. Selanjutnya, belanja bantuan sosial



pada tahun anggaran 2019 diproyeksi turun sebesar (27,68) persen. Kondisi tersebut disebabkan adanya penurunan alokasi untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah khususnya untuk program Gerakan Bersama Menuju Sampang Sehat dan Bermartabat (Gema Sahabat), sehingga secara keseluruhan alokasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.341.000.000,00. Alokasi Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Permendagri 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan tetap; belanja Bantuan Keuangan kepada Desa meningkat relatif kecil karena adanya bantuan logistik Pilkades pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 sebanyak 42 Desa; dan Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Tidak Langsung menunjukkan peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pembayaran klaim kekurangan premi asuransi Jaminan Kematian (JKM) terhadap PT. Taspen dan pengembalian sisa lebih dana hibah Pemerintah Pusat program penanggulangan bencana Rehab Rekon yang dilaksanakan oleh BPBD pada tahun 2017. Peningkatan tersebut sebesar 133,33 persen sehingga secara nominal Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2019 menjadi Rp3.500.000.000,00.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya. Pengalokasian Belanja Langsung pada PD didasarkan pada prinsip penganggaran kinerja. Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Pegawai pada belanja langsung tahun anggaran 2019 dari tahun sebelumnya menurun sebesar (23,52) persen. Secara nominal, alokasi untuk belanja pegawai pada Belanja Langsung diproyeksikan sebesar Rp 15.578.751.960,00 atau sebesar 2,56 persen dari total alokasi Belanja Langsung. Penurunan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung tersebut mengindikasikan adanya efisiensi belanja aparatur yang disebabkan perubahan organisasi perangkat daerah yang semakin efektif dan efisien, karena pada prinsipnya alokasi belanja pegawai pada Belanja



Langsung adalah dalam rangka mendukung operasional belanja lainnya pada Belanja Langsung.

Senada dengan belanja pegawai pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa juga menunjukkan pengurangan dari tahun anggaran 2018. Pada tahun anggaran 2019 belanja barang dan jasa diperkirakan berkurang (41,56) persen. Nilai dari belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp 256.284.587.615,00. Penurunan belanja barang dan jasa disebabkan kegiatan yang bersumber dari DAK terutama bidang pendidikan, bidang air minum dan sanitasi serta bidang pertanian pada umumnya adalah berbentuk belanja hibah kepada masyarakat. Belanja Barang dan Jasa berkontribusi 42,11 persen dari total Belanja Langsung.

Pada tahun anggaran 2019, belanja modal diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (0,01) persen dari tahun anggaran 2018. Secara nominal, nilai dari belanja modal pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.336.741.560.276,00 dan berkontribusi sebesar 55,33 persen dari total Belanja Langsung. Penggunaan belanja modal diutamakan untuk penambahan nilai aset daerah serta mendukung program prioritas dan peningkatan daya saing ekonomi daerah serta pengentasan kemiskinan.



**Tabel 3. 10**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 s.d Tahun 2019**

KODE	Uraian	JUMLAH						
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	APBD 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>668.707.806.632,00</b>	<b>784.377.775.801,83</b>	<b>910.263.783.188,00</b>	<b>917.934.286.612,92</b>	<b>1.013.597.161.540,00</b>	<b>828.624.979.049,67</b>	<b>826.624.979.049,67</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	564.137.968.694,00	600.134.812.980,58	641.047.653.220,00	588.450.299.459,92	647.499.375.825,00	521.838.584.429,67	521.838.584.429,67
2.1.4	Belanja Hibah	37.156.136.347,00	40.146.478.720,00	37.412.867.334,00	40.915.325.750,00	79.581.484.000,00	17.244.500.000,00	17.244.500.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	31.065.763.400,00	20.454.743.386,00	12.683.204.959,00	11.614.500.179,00	12.916.000.000,00	9.341.000.000,00	9.341.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	1.222.799.423,00	2.275.053.174,00	2.068.801.715,00	2.068.801.715,00	2.068.801.715,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa	35.733.983.191,00	123,639,152,799,00	217.250.727.252,00	274,456,553,050,00	270,031,500.000,00	274.632.092.905,00	274.632.092.905,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	613.955.000,00	2.587.916,25	646.531.000,00	222.555.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>604.552.950.803,00</b>	<b>919.793.763.745,65</b>	<b>868.284.702.062,94</b>	<b>726,299,485,723,94</b>	<b>795,817,704,807,00</b>	<b>608.604.899.851,00</b>	<b>601.302.578.157,68</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	10.690.034.000,00	9.670.303.950,00	13.834.790.361,00	15,439,082,756,00	20,472,431,620,00	15.578.751.960,00	8.276.430.266,68
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.806.195.435,00	279.966.696.289,47	290.450.222.725,60	338,825,905,149,88	438,578,849,040,00	256.284.587.615,00	250.284.587.615,00
2.2.3	Belanja Modal	354.056.721.368,00	630.156.763.506,18	563.999.688.976,34	372,034,497,818,06	336,766,424,147,00	336.741.560.276,00	342.741.560.276,00
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.273.260.757.435,00</b>	<b>1.704.171.539.547,48</b>	<b>1.778.548.485.250,94</b>	<b>1,644,233,772,336,86</b>	<b>1.809.414.866.347,00</b>	<b>1.437.229.878.900,67</b>	<b>1.427.927.557.207,35</b>
	SURPLUS/DEFISIT	91.474.885.576,87	32.595.082.751,97	-61.760.380.714,78	<b>(80,594,933,011,46)</b>	<b>139,500.000.000,00)</b>	<b>(78.413.331.451,52)</b>	<b>(68.152.744.573,54)</b>

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang dan hasil proyeksi, 2018



Pembiayaan netto di Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan lebih rendah daripada anggaran tahun anggaran 2018. Proyeksi ini didasarkan pada realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) yang lebih kecil dari proyeksi awal. Pembiayaan netto pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp 78.413.331.451,52. Nilai tersebut lebih kecil (43,79) persen dari tahun anggaran 2018 atau turun sebesar Rp 61.086.668.548,48.

Dari sisi penerimaan pembiayaan, perolehan terbesar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Perkembangan nilai SiLPA pada tahun anggaran 2017 sampai dengan proyeksi tahun anggaran 2018 menunjukkan penurunan. Realisasi SiLPA tahun 2017 sebesar Rp157.432.253.909,10. Sedangkan pada tahun anggaran 2018 nilai SiLPA diproyeksikan sebesar Rp 107.500.000.000,00. Disamping SiLPA, penerimaan pembiayaan tahun 2018, juga berasal dari Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir masing-masing sejumlah Rp 30.000.000.000,00 dan Rp 2.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2019 penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari SiLPA sebesar Rp 72.913.331.451,52 dan penerimaan kembali investasi dana bergulir sebesar Rp 3.500.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2018 dan 2019 diproyeksikan nihil. Sehingga selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan berupa pembiayaan netto secara keseluruhan dipergunakan untuk menutup defisit belanja. Perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kabupaten Sampang tahun 2014 sampai dengan proyeksi tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 11**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2019**

KODE	Uraian	JUMLAH						
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	APBD 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>110.745.826.175,06</b>	<b>204.220.711.751,93</b>	<b>230.815.794.503,90</b>	<b>159.432.253.909,10</b>	<b>139.500.000.000,00</b>	<b>78.413.331.451,52</b>	<b>68.152.744.573,54</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	110.745.826.175,06	202.220.711.751,93	228.815.794.503,90	157.432.253.909,10	107.500.000.000,00	76.413.331.451,52	66.152.744.573,54
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal pada Bank Jatim	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	110.745.826.175,06	196.220.711.751,93	214.815.794.503,90	<b>147.432.253.909,10</b>	<b>139.500.000.000,00</b>	<b>78.413.331.451,52</b>	<b>68.152.744.573,54</b>
	<b>SILPA</b>	<b>202.220.711.751,93</b>	<b>228.815.794.503,90</b>	<b>153.055.413.789,12</b>	<b>66.837.320.897,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang dan hasil proyeksi, 2018

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Sampang Tahun 2019, terdapat tiga arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
2. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
4. Menyiapkan sumber daya aparatur yang potensial, berintegritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas;
6. Menerapkan sistem pemungutan Non Tunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menekan kebocoran;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
8. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah antara lain dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait;
9. Memanfaatkan Aset/Barang Milik Daerah dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dengan pola kerjasama (*public private partnership*) untuk menyelenggarakan pelayanan publik / pembayaran pajak dengan pihak swasta.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, belanja daerah dikelompokkan menjadi 2, yakni Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcomenya*. Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 disusun untuk mendukung pencapaian program prioritas tujuan pembangunan daerah maupun tujuan nasional. Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sampang tahun 2019, didasarkan pada tiga kebijakan utama, antara lain sebagai berikut.

1. Belanja Langsung
  - a. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program* prioritas);
  - b. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas dan penanganan permasalahan utama khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
  - c. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  - d. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
  - e. Pemenuhan kebijakan belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yaitu 20 persen untuk fungsi pendidikan, 10 persen untuk urusan kesehatan serta 25 persen untuk belanja infrastruktur.

- f. Penggunaan belanja diarahkan dalam mendukung sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 serta diselaraskan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.
2. Belanja Tidak Langsung
- a. Alokasi Belanja Pegawai dianggarkan dengan mempertimbangkan rencana Pemerintah Daerah untuk mengadakan seleksi penerimaan pegawai dengan target 100 ASN dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah dirumuskan pada tahun 2018, selain belanja untuk gaji pokok dan tunjangan bagi pegawai dan anggota DPRD. Sedangkan alokasi anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari DAK Non Fisik belum dianggarkan;
- b. Kebijakan belanja hibah di arahkan kepada hibah kepada: (i) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat (untuk pengamanan wilayah rawan konflik, Pilkades serentak, dan tim saber pungli); (ii) Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Ormas Berbadan Hukum Indonesia (bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan pemerintahan); serta Belanja Hibah Kepada Ormas Berbadan Hukum Indonesia yang difokuskan untuk sarana pendidikan;
- c. Alokasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk bantuan kepada: (i) organisasi sosial kemasyarakatan (bantuan sosial kepada individu/keluarga dan bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak direncanakan) yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku; (ii) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah (lembaga perekonomian dan lembaga sosial);
- d. Belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dialokasikan dalam rangka penguatan keuangan desa terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan proporsi desa penghasil;
- e. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat keuangan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan

- dalam Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Alokasi belanja tersebut dipergunakan untuk: (i) bantuan keuangan kepada desa berupa Dana Desa (DD) Pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) Daerah; (ii) Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pembiayaan Pilkada serentak tahun 2019; serta (iii) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- f. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diperkirakan sebelumnya serta pengembalian sisa lebih atas dana hibah Pemerintah Pusat dan pembayaran kekurangan atas klaim JKM kepada PT. Taspen.

### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

### 3.2.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Peningkatan pembiayaan non-APBD melalui kerjasama dengan pihak swasta, melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Disisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa tercover oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Realisasi pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 12**  
**Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kabupaten Sampang 2018**

No	Desa	Pokmas	Anggaran (Rp)
1	Tadoan	Jambu Air	173,100.000,00
2	Banjar Talela	Bahari	173,100.000,00
3	Tambahan	Pesisir Indah	201,900.000,00
4	Dharma Camplong	Dharma Indah	236,550.000,00
5	Dharma Tanjung	Tanjung Baru	248,100.000,00
6	Sejati	Sejati Sejahtera	201,900.000,00
7	Pulai Mandangin	Gotong Royong	265,350.000,00
<b>Total</b>			<b>1,500.000.000,00</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Sampang, 2018

Berdasarkan table tersebut diatas, realisasi pembiayaan daerah non APBD berasal dari dana CSR dimana pelaksanaannya mencakup di 7 (tujuh) desa dengan total dana Rp. 1.500.000.000,00.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... 1**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 1
  - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2019 .....14
  - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan Tahun 2019.....21
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....26
  - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....26
  - 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....36
  - 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....37
  - 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....39
  - 3.2.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah .....39





Gambar 3. 1	Pertumbuhan GDP Riil Dunia, Negara Maju, <i>Emerging Market</i> dan Negara Berkembang (EMDEs), Asia Timur dan Pasifik, serta Indonesia .....	4
Gambar 3. 2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017 .....	11
Gambar 3. 3	Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017 .....	12
Gambar 3. 4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017 .....	12
Gambar 3. 5	Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2017 .....	13
Gambar 3. 6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2019 .....	15
Gambar 3. 7	Pendapatan Per Kapita Kab. Sampang Tahun 2011 – 2019 .....	18
Gambar 3. 8	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 – 2019 .....	19
Gambar 3. 9	Perkembangan Inflasi Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2019 .....	19

Tabel 3. 1	Persentase Perkembangan GDP (yoy) dan Volume Perdagangan.....	5
Tabel 3. 2	Sasaran dan Asumsi Makro Nasional 2019-2021 .....	10
Tabel 3. 3	Indikator dan Target Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 .....	13
Tabel 3. 4	PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	16
Tabel 3. 5	PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	17
Tabel 3. 6	Perkembangan Investasi Kabupaten Sampang Tahun 2013-2017.....	20
Tabel 3. 7	Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Sampang Tahun 2019 .....	21
Tabel 3. 8	Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Sampang Tahun 2018 – 2019 .....	25
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sampang Tahun 2014 s.d Tahun 2019 .....	29
Tabel 3. 10	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 s.d Tahun 2019 .....	33
Tabel 3. 11	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2019 .....	35
Tabel 3. 12	Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kabupaten Sampang 2018.....	40

